

PARTISIPASI ISTRI NELAYAN PADA ORGANISASI FORMAL

Dewi Casmiwati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Hang Tuah, Surabaya
Jalan Arief Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111, PH. 031-594 5864,
081 230 901 801, Fax. 031-594 6261

Abstract Participation of the Fisherman's Wives in Formal Organization. In Kedung Cowek, Bulak, Surabaya City, the fisheries's wives have low participation in formal organization. This is an irony because besides they are majority in population, also the function of those institutions are to bring the better life condition of society, it's hard to achieve if the society around them is not involved. This research wants to answer the question: what factors that influence the rate participation of fisheries's wives in formal organization. The research uses descriptive qualitative methods with indepth interview, observation and documentation in collecting both of primary and secondary data. The research result shows that the factors that influence the fisheries' wives in formal organization are limited education and skill of them. Beside that, limited skill only on fisheries make them enable to work in fisheries sector, not others. This condition is worst by the local culture that positioned them in domestic affairs than outside and the double roles as wives as well as workers and it's difficult for them to participate at public sector.

Keywords: *participation, formal organization, double roles, domain public, domain domestic*

Abstrak Partisipasi Istri Nelayan Pada Organisasi Formal. Di Kelurahan Kedung Cowek, Bulak, Kota Surabaya, partisipasi istri nelayan di lembaga formal rendah. Hal ini menjadi ironi disamping karena mereka merupakan mayoritas penduduk, juga fungsi lembaga untuk membawa kondisi masyarakat lebih baik, menjadi sulit untuk dicapai jika masyarakat di sekitarnya tidak dilibatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi istri nelayan di organisasi formal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi istri nelayan pada organisasi formal adalah wawasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan mereka sangat terbatas. Selain itu, keterampilan yang hanya terbatas pada perikanan membuat mereka tidak bisa bekerja di luar sektor perikanan. Kondisi ini diperburuk dengan budaya lokal yang menempatkan mereka di ranah domestik dan peran ganda baik sebagai istri maupun pekerja, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi di ranah publik.

Kata Kunci : *partisipasi, organisasi formal, peran ganda, ranah publik, ranah domestik*

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern, keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi formal adalah hal biasa, sekaligus suatu kebutuhan agar keinginan dan kebutuhan mereka senantiasa terpenuhi oleh keputusan-keputusan organisasi formal yang ada di lingkungannya. Namun sepertinya kondisi ini tidak terjadi di kalangan masyarakat nelayan, khususnya di Kelurahan Kedung Cowek, Bulak, Surabaya. Sistem pembagian kerja secara seksual berlaku di masyarakat nelayan termasuk di Kelurahan Kedung Cowek, dimana tugas-tugas di darat sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri nelayan, sedangkan di laut merupakan tanggung jawab suami, justru telah menutup peluang bagi istri nelayan untuk terlibat secara intensif dalam kegiatan publik pada organisasi formal di lingkungannya, seperti organisasi PAUD, PKK dan POSYANDU. Di Kelurahan Kedung Cowek, beberapa kegiatan organisasi formal tersebut justru dipelopori oleh Kader PKK yang notabene bukan istri nelayan, padahal jumlah istri nelayan merupakan mayoritas dari seluruh populasi yang ada disana. Kegiatan di organisasi formal biasa dilakukan secara rutin tiap minggu namun yang memelopori dan aktif disana adalah para Kader PKK.

Kalaupun para istri nelayan ikut dalam kegiatan dalam organisasi tersebut, mereka lebih senang bergerombol dan berbincang dengan ibu-ibu lainnya daripada memikirkan kegiatan yang akan dilakukan. Mereka juga tidak pernah ikut berdiskusi secara aktif dalam rapat yang diselenggarakan pengurus organisasi.

Tentu saja kondisi ini tidak bisa dibiarkan saja, disamping istri nelayan mayoritas populasi disana, fungsi kelembagaan yang ada disana tidak memberi peluang peran serta nelayan dalam kegiatan publik

Mereka tidak pernah ikut rapat karena rapat yang selama ini dilaksanakan hanya melibatkan orang-orang yang dipilih oleh Kader PKK, yang justru bukan dari kalangan nelayan. Fakta ini tentunya merupakan suatu ironi karena tujuan dibentuknya lembaga sendiri adalah untuk mengadakan perubahan kehidupan yang lebih baik. Tentunya tujuan ini akan sulit dicapai jika masyarakat yang berada di sekitar lembaga tidak diikuti sertakan dalam kegiatan kelembagaan. Dari fenomena tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu factor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi istri nelayan dalam kegiatan organisasi formal?

Penelitian mengenai peran perempuan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di berbagai daerah, salah satunya yaitu menurut penelitian Lany Verayanti (2003), dengan judul "Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam sistem masyarakat matrilineal" menunjukkan partisipasi politik perempuan Minang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (1) adalah perempuan Minang memiliki tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga sementara politik dianggap kotor, kasar dan menuntut banyak waktu; (2) adalah penafsiran agama dimana perempuan dilarang menjabat sebagai pemimpin, karena yang berhak memimpin adalah laki-laki, seperti pemahaman imam dalam sholat; (3) adalah pandangan masyarakat yang menilai perempuan yang ikut dalam dunia politik adalah perempuan yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya karena waktunya dihabiskan di luar rumah daripada mengurus keluarganya; (4) adalah harapan yang terlalu tinggi dari masyarakat dimana perempuan yang berhasil di dunia politik, maka harus berhasil dalam rumah tangga atau dengan kata lain perempuan harus mampu segalanya yang biasa disebut sebagai perempuan perkasa; dan (5) adalah tidak ada niat baik dari perempuan lokal untuk melibatkan perempuan karena pandangan bahwa kapasitas perempuan belum cukup untuk didudukkan dalam sebuah posisi di dalam pemerintahan.

Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa teori radikal kultural benar, yang memandang peranan perempuan lemah dibanding laki-laki karena keterbatasan kultural atau budaya yang menganggap perempuan identik dengan sifat lembut, gemulai, lemah dan tergantung dari laki-laki. Laki-laki sebagai imam dan perempuan sebagai makmum. Selain itu hasil penelitian menunjukkan kebenaran dari teori radikal liberal yang memandang bahwa perempuan memiliki tanggung jawab dan tugas reproduksi di rumah sehingga hal ini menghambat partisipasi perempuan di ranah publik.

Partisipasi menurut Keith Davis (1995), adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebernarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang-orang diikuti serta dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Winardi (2006), mengelompokkan dua klasifikasi organisasi yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal memiliki struktur yang terumus dengan baik, aturan yang baku dan relatif bersifat tidak fleksibel. Organisasi informal terorganisir secara lepas, bersifat fleksibel, spontan, terwujud secara sadar atau tidak sadar, sulit menentukan waktu seseorang menjadi anggota dan tujuan organisasi tidak terspesifikasi.

Beranjak dari tipe organisasi yang diungkapkan pakar teori organisasi maka keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam suatu organisasi diwarnai atau dipengaruhi oleh tipe masing-masing organisasi. Pada organisasi formal keterlibatan atau partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi terikat kepada aturan-aturan yang baku dan dirumuskan dalam struktur organisasi yang jelas. Dalam struktur organisasi dijelaskan hubungan-hubungan secara formal mengenai otoritas, kekuasaan, tugas dan tanggung jawab serta persyaratan-persyaratan perorangan bagi pemegang jabatan-jabatan dalam organisasi seperti tingkat pendidikan keterampilan, usia, jenis kelamin, waktu jam kerja dan imbalan yang diperoleh. Sedangkan dalam organisasi informal partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi tidak diatur dalam suatu struktur yang formal dan baku tetapi mereka terorganisir secara lepas dan bersifat fleksibel. Partisipasi mereka dalam organisasi bersifat spontan baik secara sadar ataupun secara tidak sadar. Hubungan kerja bersifat pribadi, langsung, spontan dan tatap muka. Persyaratan perorangan untuk memegang jabatan dalam organisasi, tidak memerlukan persyaratan yang khusus dan formal. Mereka masuk dalam dan keluar dari organisasi tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan formal dan mereka bekerja tidak terikat dalam batas-batas waktu secara formal.

Berkaitan dengan masalah penelitian partisipasi istri nelayan dalam organisasi formal dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya perlu juga ditelusuri teori tentang feminisme. Teori feminisme adalah teori yang menjelaskan perjuangan persamaan antara perempuan dengan laki-laki didalam berbagai aspek kehidupan. Menurut berbagai teori feminisme, partisipasi perempuan di ranah publik dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yang dikemukakan oleh Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Sosialis dan Feminisme Eksistensial, Tong (2004). Teori Feminisme Liberal melihat bahwa akar ketertindasan dan keterbelakangan perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan terbelakang di bidang pendidikan, ketrampilan dan ekonomi sehingga peningkatan terhadap ketiga hal ini menjadi kunci untuk menyamakan kapasitas perempuan dengan laki-laki. Hal yang

sama juga diungkapkan oleh Radatin (2013), dalam penelitiannya tentang penempatan TKW di luar negeri berada pada posisi yang lemah, karena mereka umumnya miskin, pendidikan dan keterampilan yang rendah.

Berbeda dengan teori feminisme liberal, teori feminisme radikal berasal dari gerakan hak-hak sipil, politik sayap kiri dan gerakan perdamaian. Terdapat 2 aliran dalam feminisme radikal, yakni: (1) feminisme radikal liberal yang menjelaskan peran dan tanggung jawab reproduksi dan seksual sering berfungsi membatasi pengembangan diri perempuan sebagai manusia yang utuh. Juga menolak androgini (sifat ganda maskulin dan feminim) karena hanya merangkul sifat maskulin ke dalam diri perempuan. Usulannya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penguatan esensi perempuan sendiri; dan (2) feminisme radikal kultural yang berpendapat bahwa ketidaksamaan perempuan dengan laki-laki disebabkan perempuan mempunyai nilai dan sifat yang secara kultural dihubungkan terhadap perempuan seperti suka tergantung, emosi, suka berbagi, damai, ketiadaan hirarkhi dan sebagainya. Persamaan laki-laki dan perempuan bisa diwujudkan melalui cara sosialisasi terus-menerus akan persamaan keduanya.

Teori feminisme sosialis menyatakan bahwa ketidaksamaan perempuan dengan laki-laki disebabkan karena peran ganda yang dimiliki oleh perempuan. Perempuan tidak bisa bebas beraktivitas di ranah publik, karena perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga, melahirkan anak, melayani suami, merawat anak dan sebagainya sehingga apabila beraktivitas di luar kewajiban tersebut, perempuan tidak bisa meraih prestasi setinggi laki-laki. Oleh karena itu menurut Teori Feminisme Sosialis jika perempuan mau sama dengan laki-laki, perempuan harus bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung dari laki-laki dan kalau perlu meminta gaji atas pekerjaan rumah tangga yang dilakukannya. Ketidaksamaan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat juga dipicu oleh perbedaan jenis kelamin secara koderati yang secara historis dan nampaknya masih berlaku hingga sekarang ini (Budi Rajab,2009). Kemudian masyarakat memapankan dan memperluas perbedaan koderati tersebut melalui *stereotypes* dan malah selanjutnya dalam posisi sosial pun mereka dibedakan dan dipisahkan sehingga ciri-ciri-biologis yang melekat pada perempuan yang lemah dan emosional memicu mereka hanya pantas dalam kegiatan dilingkungan rumah tangga (*domain domestic*) sementara laki-laki dianggap lebih kuat dan rasional, tugas dan pekerjaan kesehariannya didorong untuk berada di ranah publik (*domain public*).

Pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan atas domain domestic dan domain public juga dikemukakan oleh Intje (2006), bahwa kedudukan wanita keturunan Menak dalam struktur dalam masyarakat sunda dapat ditentukan dari aktifitas dan perannya disektor domestik dan sektor publik. Perbedaan peranan dan aktifitas perempuan laki-laki dalam masyarakat disoroti pula oleh Ismi (2012), dengan konsep diskriminasi gender, dimana dikatakan bahwa praktik diskriminasi gender dibidang sumber daya manusia hingga saat ini masih terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Praktik diskriminasi yang dialami oleh perempuan antara lain ialah perempuan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada level-level yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dipandang tidak cocok melakukan pekerjaan managerial dan perempuan cenderung menjadi pengurus utama bagi anak-anak dan menjalankan peran gandanya.

Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi istri nelayan dalam kegiatan organisasi formal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Lokasi penelitian di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Sumber informasi (informan) ditentukan melalui *purposive sampling*, yakni bunda PAUD, Kader PKK, Ketua RW, aparat kelurahan dan istri nelayan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data menggunakan metode interaktif melalui tahap pengumpulan, pengurangan, klasifikasi, analisa dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Tingkat pendidikan

Mayoritas tingkat pendidikan istri nelayan tergolong rendah, yakni mayoritas lulusan SLTA ke bawah dan bahkan ada yang tidak sekolah. Jumlahnya lebih dari 50% dari populasi perempuan disana. Gambaran mengenai tingkat pendidikan istri nelayan di Kelurahan Kedung Cowek dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Tahun 2011

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Penduduk yang tidak sekolah (usia balita)	102
2	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	0
3	Penduduk tamat SD / sederajat	1380
4	Penduduk tamat SLTP / sederajat	1026
5	Penduduk tamat SLTA / sederajat	1858
6	Tamatan Akademi Tinggi	25
7	Drop Out Sekolah Dasar	12
8	Drop Out SLTP/Sederajat	12
9	Drop Out SLTA	21
	TOTAL	4436

Sumber : Kecamatan dalam Angka Tahun 2011

Tingkat pendidikan mayoritas penduduk Kelurahan Kedung Cowek adalah SLTA ke bawah, bahkan masih banyak yang hanya lulus tingkat SD (tabel 1). Berdasar temuan dilapangan, kondisi ini juga dialami anak-anak sekarang. Rata-rata mereka lulus SD atau SMP dan rupanya tingkat pendidikan ini berpengaruh pada pola pikir istri nelayan dalam memandang organisasi formal di Kelurahan Kedung Cowek. Mereka menganggap partisipasi aktif di organisasi tersebut kurang penting dibanding dengan mengolah hasil melaut suaminya. Mereka sekedar berpartisipasi secara pasif, yakni sebagai peserta dan bukan *leader* atau pemimpin.

Demikian halnya didalam menurunkan sudut pandangnya ke anak-anak mereka, para istri nelayan menanamkan bahwa pendidikan yang tinggi kurang penting, seperti yang disampaikan responden:

Saya sendiri tidak sekolah begitu juga ibu dan anak-anak yang lain, karena begitulah pandangan orang-orang dahulu. Anak saya sebanyak tujuh orang, empat

sudah menikah dan ikut bersama suaminya sedangkan yang tiga orang lagi masih kecil. Yang sekolah hanya empat orang dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) dan tiga orang lagi tidak mau sekolah bahkan untuk dimasukan kesekolah PAUD saja mereka tidak mau (Wawancara, 16 Januari 2013).

Sementara responden lain mengatakan:

Saya tidak ikut kegiatan organisasi dikelurahan, biarlah ibu-ibu yang pintar itu saja yang ikut, saya menurut saja karena tingkat pendidikan saya rendah. Sekolah saya hanya sampai tingkat sekolah dasar (SD), itu pun tidak lulus (Wawancara, 16 Januari 2013).

Dari ungkapan responden tersebut menunjukkan rendahnya pendidikan mempengaruhi cara pandang mereka baik terhadap lembaga formal maupun dalam mendidik anak-anaknya. Kenyataan ini sesuai dengan teori feminisme liberal dimana rendahnya peran perempuan di ranah publik disebabkan oleh faktor pendidikan.

Keterampilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketrampilan istri nelayan terbatas pada pengolahan hasil laut dan rata-rata tidak punya pengalaman berorganisasi. Mereka bahkan cenderung aktif di organisasi informal seperti pengajian dan itupun dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan rutinnnya. Keterampilan yang lain juga terkait dengan pengolahan hasil laut, seperti berdagang atau berjualan tidak mereka miliki. Hal ini tampak pada kegiatan istri nelayan setiap harinya yang disibukkan dengan mengolah hasil laut. Keterampilan ini didapatkan dari nenek moyang mereka, atau turun temurun. Mereka juga enggan melakukan kegiatan dengan modal keterampilan yang lain karena sudah nyaman dan enak dengan yang dilakukan selama ini, apalagi kumpul untuk berorganisasi. Para istri nelayan hanya memiliki ketrampilan untuk mengolah hasil laut, dan sangat kurang ketrampilan maupun pengalamannya dalam berorganisasi. Kondisi ini sepham dengan teori feminisme liberal yang menyatakan rendahnya peran perempuan di ranah publik disebabkan kurangnya keterampilan.

Keadaan Ekonomi

Dilihat dari segi ekonomi, pendapatan rumah tangga nelayan berkisar dari Rp 500.000.- sampai Rp 4.500.000.- perbulan, dengan rata-rata Rp 1.163.000,- perbulan tiap rumah tangga dan Rp 248.500,- perkapita perbulan. Yang tertinggi adalah juragan atau nelayan pemilik, sementara yang rendah adalah buruh nelayan. Juragan biasanya memiliki perahu/kapal dan toko sendiri, sementara buruh nelayan bekerja atau menyewa kapal pada juragan. Hasil melaut buruh nelayanpun biasanya dijual kepada juragan dengan harga murah karena sebelumnya mereka terikat hutang. Sementara jumlah juragan di Kelurahan Kedung Cowek tidak lebih dari 10 orang, dan yang bermata pencaharian sebagai nelayan/buruh nelayan sebanyak 678 orang (Data Tahun 2011).

Yang lebih memprihatinkan adalah pendapatan nelayan tergantung dari musim, jika air laut pasang, biasanya mereka menganggur dan melaut lagi pada saat air surut, sehingga pendapatan mereka tidak stabil. Beban keluarga rata-rata 4-7 orang. Kondisi ekonomi yang kurang membuat istri nelayan harus membantu suaminya untuk menambah penghasilan keluarga. Istri nelayan yang bekerja tersebut didorong oleh motivasi membantu suaminya mencari nafkah dan hal inilah yang kemudian menyebabkan mereka tidak memiliki waktu untuk partisipasi dalam organisasi formal.

Faktor ekonomi juga sebenarnya yang menyebabkan mereka berpendidikan rendah dan akhirnya membentuk pola pikir yang tidak sampai ke arah organisasi. Kenyataan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan feminisme liberal dimana kondisi ekonomi mempengaruhi rendahnya jumlah perempuan untuk aktif ke sektor publik.

Waktu Reproduksi

Kegiatan reproduktif disini adalah kegiatan memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan mengasuh anak. Kenyataannya waktu yang diperlukan untuk kegiatan reproduksi baik istri nelayan yang bekerja maupun tidak bekerja termasuk banyak, yakni antara 5-8 jam per hari. Waktu yang dipergunakan untuk masing-masing kegiatan reproduksi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Alokasi Waktu untuk Kegiatan Reproduksi (Jam)

Kegiatan	Istri Nelayan yang Bekerja	Istri Nelayan yang tidak Bekerja
Memasak	1.30 - 2	1.30 - 2
Membereskan rumah	1	1
Mencuci pakaian	1.30 - 2	1.30 - 2
Mengasuh anak	2 - 3	3 - 5
Jumlah	6 - 8	7 - 10

Sumber: Data Primer, 2013

Waktu yang digunakan untuk reproduksi 25-41% sedang lebih kurang 13 jam selebihnya (55%) dalam sehari digunakan untuk kegiatan lainnya, seperti istirahat dan keperluan sendiri. Waktu untuk reproduksi yang memakan waktu 1/3 bahkan lebih ini jelas mempersempit waktu mereka untuk kegiatan yang lain, termasuk kegiatan berorganisasi. Sekiranya pemikiran yang disampaikan feminisme radikal liberal terkait dengan fungsi reproduksi menghambat perempuan dibanding laki-laki untuk berkiprah ke ranah publik menemukan kebenaran.

Budaya Patriarkhi

Nelayan di Kelurahan Kedung Cowek memiliki budaya Islam yang begitu kental dan hal ini bisa dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari. Mereka beribadah ke mushola, masjid, pengajian, selamatan dan kegiatan lain bernafas Islam. Kondisi ini memberi pengaruh pada keyakinan bahwa perempuan tidak harus tampil di muka, dan laki-laki sebagai imam. Demikian halnya dengan pandangan mayoritas kaum laki-laki di wilayah ini yang menganggap perempuan sebagai konco wingking. Tugas perempuan yang tidak lain hanya mengurus rumah tangga, membantu suami sepulang melaut, merawat anak dan mencuci. Selain itu masih sering dijumpai pernikahan di usia muda. Apabila wanita ini sudah tidak bersekolah lagi, maka akan dinikahkan oleh orang tuanya seperti yang diungkap responden berikut.

Perkataan orang-orang dulu adalah merupakan doa. Orang-orang mengatakan 'duduk didepan pintu akan menghalangi masuknya rezeki, kalau suaminya kerja dan perempuannya tidur makanya rezekinya tidak ada. (Wawancara, 21 Januari 2013).

Informan lain juga menyatakan hal serupa :

Kondisi seperti itu sampai sekarang masih tetap begitu saja. Oleh karena itu perempuan tempatnya hanya di rumah merawat suami dan ke dapur.

Bahwa kata-kata orang tua dahulu itu lebih mujarab. Dulu ibu saya menasehati bahwa perempuan tidak bekerja jauh-jauh dari rumah. Karena itu saya memilih kerja membantu suami dan sekaligus dapat merawat anak-anak. (Wawancara 9 Februari 2013)

Dari penuturan kedua informan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat Kedung Cowek masih didominasi oleh budaya patriarkhi dimana perempuan ditempatkan di ranah domestik, mengurus anak dan suami dan ini bukan tanggung jawabnya laki-laki. Budaya ini mengakibatkan peran istri dalam berorganisasi kurang optimal karena adanya budaya patriarkhi yang membatasi ruang gerak istri nelayan dalam berinteraksi maupun berorganisasi dengan lingkungan diluar keluarga. Mereka lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah daripada di luar rumah.

Peran Ganda Istri Nelayan

Hampir seluruh istri nelayan memiliki peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun kegiatan yang bersifat ekonomis, yakni mengolah hasil laut guna membantu suaminya untuk menghasilkan pendapatan. Mereka melakukannya dari pagi sampai sore, sehingga tidak ada waktu untuk berorganisasi. Walaupun ikut mereka merasa tidak nyaman, karena ada pekerjaan menunggu di rumah. Kalau dikaji lebih lanjut maka kondisi para istri nelayan yang memiliki peran ganda sekaligus menghambat ruang gerak mereka untuk melakukan kegiatan sosial diluar rumah tangga. Peran ganda membuat perempuan terdiskriminasi dan lebih lanjut tidak akan bisa melakukan kegiatan seperti yang dilakukan laki-laki karena keterbatasan waktu dan beban yang dimiliki.

PEMBAHASAN

Partisipasi seseorang dalam organisasi mendorong orang untuk mengembangkan tenaga dan pikirannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, tetapi tidak semua orang yang mampu atau bersedia ikut berpartisipasi dalam setiap organisasi baik dalam organisasi formal maupun dalam organisasi informal. Keterlibatan seseorang dalam organisasi ditentukan oleh tipe atau karakteristik organisasi dan karakteristik orang yang akan ikut dalam organisasi tersebut. Organisasi formal pada dasarnya merupakan sebuah entitas yang berorientasi pada tujuan tertentu yang dibentuk guna mengkomodasikan upaya-upaya para individu dan kelompok didalamnya yang dibentuk secara formal (Winardi,2006).

Karena bersifat formal maka keterlibatan seseorang dalam kegiatan organisasi diatur dalam pola-pola kerja dan hubungan-hubungan individu disusun secara sadar dan diakui secara resmi dalam suatu struktur organisasi, dimana masing-masing anggota ditetapkan otoritas, kekuasaan, dan tanggung jawab. Untuk memegang jabatan-jabatan dalam organisasi harus memenuhi persyaratan perorangan antara lain meliputi, tingkat pendidikan, keterampilan, usia, jenis kelamin, batas waktu jam kerja dan imbalan yang diperoleh.

Berangkat dari penjabaran tipe organisasi formal dan persyaratan-persyaratan perorangan yang harus dipenuhi seseorang untuk memegang jabatan organisasi formal tersebut sepertinya sulit dilakukan oleh istri-istri nelayan di Kelurahan Kedung Cowek, Surabaya. Bagi mereka untuk terlibat secara langsung dalam organisasi formal terutama

sebagai pengurus organisasi tidak mudah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat, termasuk istri nelayan di Kelurahan Kidung Cowek umumnya tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ke bawah bahkan sebagian besar dari mereka adalah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak mempunyai keterampilan dan pendidikan profesi sehingga sulit bagi mereka untuk menduduki jabatan-jabatan dalam kepengurusan organisasi formal yang ada di kelurahan. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada pola pikir istri nelayan dalam memandang organisasi formal di kelurahan. Mereka menganggap bahwa partisipasi aktif dalam organisasi formal kurang penting dibandingkan dengan mengelola hasil laut suaminya.

Pengaruh rendahnya tingkat pendidikan pada pola pikir nelayan ditemukan pula oleh Sukarman (2012), dalam penelitiannya tentang produktivitas nelayan tradisional di Provinsi Gorontalo bahwa mereka mempersempit cakrawala terhadap lapangan pekerjaan lain, selain melaut sehingga timbul persepsi bahwa mereka sebagai nelayan sudah merupakan takdir. Keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan yang dimiliki perempuan akan menjadi kendala bagi perempuan nelayan dalam usaha pengembangan perikanan (Muhammad Adriani, 2008). Mereka merasa nyaman dan enak sebagai pengelola hasil tangkapan suaminya karena dalam mengelola hasil laut tidak memerlukan keterampilan khusus, tetapi cukup dengan keterampilan tradisional yang diterimanya secara turun-menurun dari nenek moyangnya.

Sedangkan untuk ikut berpartisipasi dalam organisasi formal di Kelurahan dengan kondisi tingkat pendidikan rendah, mereka merasa tidak mampu karena tidak terbiasa bekerja dengan aturan-aturan formal yang berlaku dalam organisasi formal dan bersifat mengikat. Mereka lebih senang dan leluasa bekerja di lingkungan rumah tangga dan keluarga dengan usaha mengelola hasil tangkapan ikan laut dari suaminya. Mereka bekerja didorong atas kesadaran untuk membantu suami guna menambah pendapatan keluarga. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Ekowanti, dkk. (2012), menunjukkan sebanyak 27% istri nelayan di wilayah Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) melakukan kegiatan produktif sedang 73% tidak bekerja dan banyak melakukan kegiatan rumah tangga.

Selain waktu yang cukup banyak untuk kegiatan pengelolaan hasil laut, istri nelayan juga membutuhkan waktu untuk kegiatan reproduksi sebagai istri dan ibu rumah tangga selama 7-8 jam perhari. Dengan demikian, maka alokasi waktu untuk ikut kegiatan organisasi formal di kelurahan sangat terbatas dan partisipasi mereka hanya bersifat insidental. Hasil penelitian ini juga ditemukan Susy, dkk. (2007) bahwa partisipasi wanita dalam kegiatan sosial seperti PKK, arisan dan wirid pengajian rata-rata 4,90 jam perbulan. Sementara hasil penelitian Rochgiyanti, dkk. (2004), menunjukkan bahwa meskipun perempuan cukup disibukan dengan kegiatan usaha dan urusan rumah tangga namun sebagian kecil dari mereka (18,19%) masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan (diranah publik). Banyaknya lokasi waktu yang digunakan istri nelayan dalam kegiatan ekonomi rumah tangga dan kegiatan reproduksi menjadikan mereka sulit untuk melakukan kegiatan di luar rumah tangga atau untuk tampil di ranah publik dan akhirnya akan tetap tinggal dalam kegiatan rumah tangga atau berada di ranah domestik.

Pendominasian perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik juga disebabkan faktor gender yang membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat (Ismi, 2011 dan Hetty, 2012). Perempuan beraktifitas di ranah domestik melakukan kegiatan reproduksi dan walaupun mencari nafkah maka sifanya

hanyalah mencari nafkah tambahan untuk keluarga, sedangkan laki-laki berada di ranah publik, melaksanakan fungsi produksi dan bertanggung jawab untuk mencari nafkah keluarga. Ternyata persepsi masyarakat terhadap perempuan dan pola pikir perempuan nelayan sendiri telah menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan kemampuannya di ranah publik dan status dalam kehidupan masyarakat. Merekapun akhirnya berada sebagai warga negara kelas dua dibanding laki-laki. Padahal setiap individu memiliki kemauan berfikir dan mengembangkan kemampuannya untuk mengambil keputusan dalam dunia sosialnya (Dessy Artina, 2010).

Permasalahan pokok yang lain yang dihadapi istri nelayan adalah berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki. Untuk mengatasi masalah ini Ika Sartika (2011), mengemukakan perlu adanya intervensi pemerintah dalam usaha pemberdayaan nelayan dalam pengelolaan hasil tangkapan ikannya, baik yang bersifat tradisional maupun *cluster* industri. Usaha pemberdayaan itu diantaranya berupa bantuan dana sosial, usaha perikanan dan dana simpan pinjam bergilir serta pembinaan manajemen usaha, mutu hasil olahan perikanan dan manajemen pemasaran hasil perikanan. Dengan usaha pemberdayaan tersebut maka perempuan nelayan diharapkan mampu meningkatkan usaha perikananannya dan hasil pengelolaan ikan dapat menembus pasar yang lebih luas.

Studi kasus usaha pemerintah dalam pemberdayaan perempuan nelayan pernah dilakukan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui penggunaan produk pupuk cair *Newsqita* dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi perempuan nelayan (Andjar dan Anugerah, 2012). Penggunaan pupuk cair *Newsqita* dilakukan oleh 15 organisasi kelompok perempuan yang dibagi dua kategori kelompok yaitu kelompok pemanfaatan hasil laut dan kelompok budidaya ikan tawar. Hasil yang diperoleh dari pemberdayaan perempuan berbasis IPTEK pupuk cair *Newsqita* adalah pembuatan produk kuliner yaitu pembuatan bakso ikan, *nugget* ikan, kerupuk ikan, ikan krispi, bandeng duri lunak dan bandeng kremes. Selain itu, pemberdayaan perempuan dengan teknologi *Newsqita* ini dapat memberi nilai tambah bagi perempuan nelayan sendiri dan bahkan bagi masyarakat miskin sekitarnya melalui pengelolaan limbah dari pengolahan hasil laut yang menghasilkan produk baru yaitu berupa makanan ternak unggas dan pupuk tanaman produktif. Dampak selanjutnya, pemberdayaan ini dapat mengurangi limbah dari produk makanan ikan, membuka lapangan kerja dibidang peternakan unggas dan produksi tanaman sayur-sayuran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Yang lebih penting lagi pemberdayaan perempuan melalui IPTEK dapat meningkatkan derajat perempuan dari peranan sebagai ibu rumah tangga (ranah domestik) menjadi mata rantai kehidupan masyarakat yang lebih luas (ranah publik). Persepsi dan pola pikir perempuan yang selama ini, dimana perempuan hanya pantas untuk kegiatan atau aktifitas rumah tangga (ranah domestik) dan laki-laki hanya pantas untuk kegiatan diluar rumah tangga (ranah publik) lama-kelamaan akan pudar dan keadilan gender yang selama ini diperjuangkan wanita dalam kehidupan masyarakat akan terwujud

Keadaan istri nelayan sebenarnya menggambarkan apa yang diungkap teori liberal (pendidikan dan ketrampilan), sosialis (peran ganda) dan radikal kultural (budaya patriarkhi). Oleh karenanya perlu adanya peningkatan pendidikan, ketrampilan dan penataan ulang keadaan sosial budaya yang ada melalui program pemberdayaan. Teori feminisme eksistensial yang mengedepankan peran perempuan dengan menonjolkan

kemampuan perempuan sendiri perlu diadopsi guna mengatasi masalah ini (Tong: 2004).

Disamping itu adanya program pemberdayaan terhadap istri nelayan, salah satunya melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan dengan menggunakan media informal yang selama ini digeluti mereka. Di waktu mereka berkumpul di acara informal diisi dengan program-program yang bisa meningkatkan ketertarikan untuk berpartisipasi di lembaga formal.

Hal tersebut seperti yang diungkap teori “ACTORS” tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997), lebih memandang masyarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: (1) mendorong adanya ketabahan; (2) mendelegasikan wewenang sosial; (3) mengatur kinerja; (4) mengembangkan organisasi (baik lokal maupun ekstern); (5) menawarkan kerjasama; (6) berkomunikasi secara efisien; (7) mendorong adanya inovasi; dan (8) menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kerangka kerja pemberdayaan dapat dilihat dari akronim “ACTORS” antara lain terdiri dari:

A= *authority* (wewenang) dengan memberikan kepercayaan

C= *confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan)

T= *trust* (keyakinan)

O= *opportunities* (kesempatan)

R= *responsibilities* (tanggung jawab)

S = *support* (dukungan)

Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka kerja “ACTORS” adalah sebagai berikut: (1) *authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik; (2) *confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah; (3) *trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya; (4) *opportunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri; (5) *responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan (6) *support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak. Dengan menggunakan kerangka kerja ACTORS tersebut, guna menumbuhkan keberdayaan masyarakat, akan dapat dilakukan dengan mengacu pada pemberdayaan yang berasal dari dalam dan dalam masyarakat. Di mana pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai aktornya.

SIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam organisasi formal ditentukan oleh tipe atau karakteristik organisasi dan karakteristik perempuan yang akan ikut dalam organisasi tersebut. Berdasarkan tipe atau karakteristik organisasi formal dan karakteristik perempuan nelayan di kelurahan Kedung Cowek ternyata tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi formal sangat rendah. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam organisasi formal disebabkan karena keterbatasan wawasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki untuk memasuki wilayah organisasi formal. Mereka merasa lebih senang melakukan kegiatan di rumah tangga (ranah domestik) daripada kegiatan di luar rumah tangga (ranah publik). Persepsi atau pola pikir demikian diperparah lagi oleh budaya patriarki yang dominan, yang membuat perempuan semakin sulit bersaing dengan laki-laki di ranah publik. Disamping itu alokasi waktu untuk kegiatan pada organisasi formal sangat terbatas sekali karena banyaknya waktu yang digunakan untuk kegiatan peran gandanya dalam rumah tangga.

Dalam beberapa penelitian terbukti bahwa perempuan sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya ke ranah publik dengan meningkatkan potensi dan kemampuan mereka sendiri baik dari segi wawasan pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan. Tentunya hal ini bisa terwujud apabila adanya kemauan dari perempuan itu sendiri dan intervensi dari pihak pemerintah. Dengan demikian perempuan bukan lagi menjadi penanggung jawab utama pekerjaan rumah tangga namun terjadi pembagian kerja yang lebih adil dengan para suaminya. Apabila perempuan memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, didukung ekonomi yang lebih baik dan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan saling pengertian dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, diyakini bisa mengurai permasalahan yang menghambat mereka untuk aktif di ranah publik, terutama organisasi formal. Namun keyakinan demikian perlu dukungan penelitian lebih lanjut sehingga citra memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua dalam kehidupan bermasyarakat dapat diminimalisir.

Daftar Rujukan

- Andjar Prasetyo dan Anugerah Yuka Asmara, 2013. *Implementasi Program Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jurnal Jiana, 12 (2).
- Budi Rajab, 2009. *Perempuan Dalam Modernisme dan Post Modernisme*. Jurnal Sosiohumaniora, 11 (1).
- Dessy Artina, 2010. *Politik Hukum Kesetaraan Jender di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum 1 (1).
- Ekowanti, Mas Roro Lilik E, Tri Ratnawati, Dewi Casmiwati dan Aniek Sulestiani, 2012. *Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan melalui Pendekatan Pemberdayaan Wanita Nelayan di Pantai Timur Surabaya*. Laporan Penelitian, Universitas Hang Tuah.
- Hetty Antje Geru, 2012. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Wanita*. Jurnal Jiana, 12 (1).
- Hj. Intje Marlina, 2006. *Kedudukan Wanita Menak dalam Struktur Masyarakat Sunda*. Jurnal Sosiohumaniora, 8 (2).
- Ika Sartika, 2011. *Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan*. Jurnal Jiana, 11 (2)
- Ismi Dewi Astuti Nurhaeni, 2011. *Reformasi Administrasi Publik Adil Gender*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIP Universitas Sebelas Maret.

- _____,2012. *Reformasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Adil Gender: Harapan Regulasi Affermative Action*. Jurnal Civil Service, 6 (2).
- Keith Davis & John W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh. Terjemahan. Jakarta : Erlangga, 1995. Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>. diakses pada 21 September 2013.
- Lany Verayanti dkk. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal Banjar*. “Disertasi”, tidak dipublikasi. Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Muhammad Adriani dan Junius Akbar, 2008. *Peranan Wanita dalam Kegiatan Usaha Perikanan di Desa Sungai Rasau dan Desa Sungai Bakau Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan*. Jurnal Kalimantan, XXVI (71).
- Redatin Parwadi, 2013. *Implementasi Kebijakan TKW di Luar Negeri*. Jurnal Jiana, 12 (2).
- Rochgiyanti. M.F., Sri Ekonomi dan Maria L.A.S, 2004. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Usaha di Sektor Informal Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*. Jurnal Kalimantan, XXII (63).
- Sarah Cook & Steve Macaulay, 1997. *Perfect Empowerment*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sukarman Kamuli, 2012. *Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Bina Bahari pada Produktivitas Nelayan Tradisional*. Jurnal Jiana, 12 (1).
- Susy Edwina, Roza Yulida dan T. Leni Suzana, 2007. *Kontribusi dan Keterlibatan Wanita Dalam Aktivitas Agro Industri di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Industri dan Perkotaan, XI (20).
- Tong, Rosemarie Putnam, 2004. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Jakarta, Penerbit JALASUTRA.
- Winardi, 2006. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Grafindo Persada.